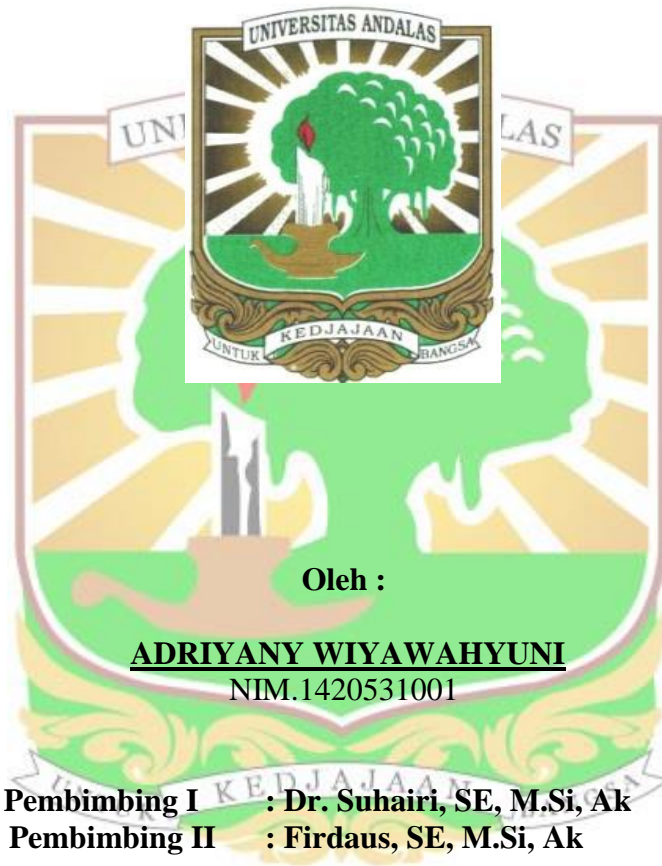


**ANALISIS TEMUAN ASET TETAP  
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)  
(Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, Kabupaten  
Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Selayar)**

**T E S I S**



**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**  
**ANALISIS TEMUAN ASET TETAP**  
**PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)**  
**(Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kepulauan Aru,**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar)**

*Oleh: Adriyany Wiyawahyuni*

(Dibawah bimbingan Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak dan Firdaus SE. M.Si, Ak)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan utama yang menyebabkan aset tetap menjadi temuan di Pemerintah Daerah tahun 2012 - 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *judgement sampling*.

Metode kuantitatif adalah metode pengolahan data yang dilakukan dengan statistik sederhana terhadap dokumen laporan keuangan di 3 (tiga) Pemerintah Daerah di Indonesia yang terpilih sebagai sampel, yaitu Kab. Manokwari- Prov. Papua Barat, Kab. Kep. Selayar - Prov. Sulawesi Selatan, Kab. Kepulauan Aru - Prov. Maluku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap yang paling sering menjadi temuan pada pemerintah daerah dari segi jumlah temuan adalah peralatan dan mesin. Sedangkan dari segi nilai temuan terbesar adalah aset jalan, irigasi dan jaringan. Pemerintah Daerah yang paling banyak jumlah temuan aset tetapnya tahun 2012 - 2014 adalah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dari segi nilai temuannya adalah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Permasalahan utama yang menyebabkan aset tetap menjadi temuan dari segi jumlah temuan adalah permasalahan pencatatan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai peraturan yang berlaku dan permasalahan aset tetap belum memiliki sertifikat/bukti pendukung yang sah. Dari sisi nilai temuannya adalah permasalahan belum dilakukan/selesainya Inventarisasi & Penilaian (IP) dan permasalahan pencatatan dan penatausahaan aset tetap tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk itu, Pemerintah daerah diharapkan agar menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI terhadap temuan aset tetap yang terjadi, meningkatkan etos kerja dan disiplin pengurus barang, meningkatkan koordinasi dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap, serius dalam merencanakan dan meningkatkan target aset yang akan disertifikasi atau dilengkapi bukti pendukungnya, melakukan inventarisasi aset tetap untuk melengkapi data aset tetap secara lebih rinci dan akurat.

Kata kunci : Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemerintah Daerah, Permasalahan Aset Tetap.

**The Analysis of Fixed Assets Findings of Audit Reports (LHP)  
(The case of Indonesian Local Governments – Kabupaten manokwari, Kabupaten  
Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Selayar)**

By : Adriyany Wiyawahyuni

Supervised by: Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak and Firdaus SE. M.Si, Ak

*Abstract*

The objective of this research is to find out the main problem that caused the findings of fixed assets in local government for the year 2012 – 2014. This research is a quantitative descriptive research conducted judgement sampling.

Quantitative techniques is a data processing method using simple statistic to the three Indonesian Local Government's financial statements. Based on the judgement sampling there are three Indonesian Local Governments chosen as samples. They are Kabupaten Manokwari – West Papua Province, Kabupaten Kepulauan Selayar – South Sulawesi Province, Kabupaten Kepulauan Aru – Maluku Province.

The result of the research showed that the findings of fixed assets in the Indonesian Local Government in terms of the number of findings were machinery and equipment. While in the term of the biggest value of the findings were road, irrigation and network. The Indonesian Local Government with the most fixed assets findings for the year 2012-2014 was Kabupaten Kepulauan Selayar – South Sulawesi Province. In other hand, in term of the value of findings was Kabupaten Manokwari - West Papua Province. The major cause of findings of fixed asset in term of number of findings were the recording and the administration matters and the findings of the assets did not have legal certificate or valid supporting evidence. Meanwhile in term of the value of findings, the inventory and the valuation were not carried out well. Another problems arisen were also the recording and the administration which were not in accordance with the regulation.

Therefore, the Indonesian Local Governments are suggested to follow up the recommendations of Indonesian Supreme Audit Institution (BPK-RI) on fixed assets, increase the dicipline and working motivation of the administrator of goods (pengurus barang), increase the coordination and the commitment of related parties in the administrations of fixed assets, well planned and increasing number of certified of fixed assets which also equipped with supporting evidence, conduct fixed assets inventory to complete fixed assets data be more accurate and detail.

Keywords : Examination Results Report, Fixed Asset issues